

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir Kota Padang, pusat ekonomi dan pemerintahan Sumatera Barat, telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Peningkatan trafik lalu lintas yang cukup signifikan sebagai dampak pertumbuhan penduduk dan berkembangnya sektor perekonomian dan perindustrian dalam perkembangan tahun ke tahun Kota Padang. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang diikuti oleh peningkatan pertumbuhan penduduk dan kendaraan pribadi.

Pertumbuhan populasi Kota Padang akan berdampak pada kebutuhan transportasi. Berdasarkan data *Electronic Registration and Identification* (ERI) Korps Lalu Lintas Polri pada November 2024 jumlah kendaraan bermotor terbanyak yaitu Kota Padang sebanyak 840,36 ribu unit dalam lingkup kabupaten / kota di provinsi Sumatera Barat. Salah satu dampak yang terlihat dari peningkatan kebutuhan transportasi adalah kepemilikan kendaraan bermotor pribadi. Peningkatan tersebut menjadi persoalan ketika banyaknya jumlah kendaraan yang tidak diiringi dengan perubahan fasilitas lahan seperti permasalahan publik, yaitu kemacetan.

Kemacetan mengganggu kelancaran arus lalu lintas pada jalan yang ada, sehingga berdampak buruk baik bagi pengguna angkutan umum maupun angkutan pribadi, hal ini menyebabkan ketidaknyamanan dan menambah waktu perjalanan bagi pelaku perjalanan (Margareth et al., 2015). Untuk mengurangi kemacetan, pemerintah menambah jaringan jalan baru. Namun, sebagai akibat dari banyaknya jalur baru, jumlah kendaraan pribadi akan meningkat. Pemanfaatan transportasi umum dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi permasalahan kemacetan tersebut.

Karena jadwal yang tidak teratur, sistem pembayaran yang tidak praktis, rute yang tidak menjangkau seluruh wilayah, keamanan dan kenyamanan, dan fasilitas infrastruktur yang kurang, transportasi umum telah kehilangan popularitas masyarakat (Rasyid et al., 2018). Untuk menangani masalah ini,

transportasi umum yang ada di Padang harus diatur oleh pemerintah kota sebagai pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja layanan operasional seperti keamanan dan kenyamanan menjadi fokus yang sangat penting untuk memberikan layanan terbaik bagi penumpang.

Penataan sistem transportasi harus terintegrasi untuk menciptakan ketersediaan transportasi nasional yang sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat, diperlukan layanan yang memadai dengan biaya terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Untuk menjawab persoalan diatas terdapat bagian transportasi yang dapat membantu hidup orang banyak adalah transportasi umum. Pelayanan angkutan umum yang terpadu dan dapat dianggap dapat mengurangi ketergantungan masyarakat dalam menggunakan kendaraan pribadi, perlu dilakukan pengembangan pelayanan angkutan umum massal berbasis jalan di wilayah perkotaan dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, pemerintah bersama Dinas Perhubungan Kota Padang menghadirkan transportasi yang sesuai dengan amanat UU No. 22 tahun 2009 disebutkan bahwa pemerintah baik pusat dan daerah berkewajiban menyediakan angkutan umum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sehingga, pada tahun 2014 resmi dioperasikan transportasi modern berbasis Bus Rapid Transit (BRT) yang biasa dikenal dengan Trans Padang. Pengoperasian Trans Padang berakibat pada pengurangan kendaraan-kendaraan umum lainnya seperti menghilangnya bus Kota dan pengurangan jumlah penumpang pada angkutan Kota (angkot).

UPT Trans Padang awalnya mengawasi BRT Trans Padang. Namun, sejak tahun 2021 dialihkan ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM). Setelah perubahan tersebut, jam operasional sebelumnya diubah dari pukul 06.00 WIB hingga 21.00 WIB menjadi pukul 06.00 WIB hingga 19.00 WIB. BRT Trans Padang tersedia untuk orang-orang yang ingin bertransportasi di enam koridor yaitu koridor 1 Lubuk Buaya – Pasar Raya, koridor 2 Bungus – Pasar Raya, koridor 3 Air Pacah – Pasar Raya, koridor 4 Teluk Bayur – Anak Air, koridor 5 Indarung – Pasar Raya, dan koridor 6

Limau Manis – Pasar Raya dengan biaya khusus pelajar sebesar Rp1.500 dan khusus umum sebesar Rp3.500, dengan kapasitas 40 penumpang.

BRT Trans Padang melayani masyarakat dengan jumlah penumpang per koridor yang berbeda secara signifikan tergantung pada tujuan koridor yang memiliki akses langsung pada perkantoran, sekolah, dan fasilitas Kota lainnya. Dilengkapi dengan fasilitas tempat duduk prioritas untuk penumpang lanjut usia, ibu hamil, berkebutuhan khusus dan anak balita. Beberapa koridor hanya sedikit didominasi oleh pelajar dan umum sesuai dengan jam sibuk dan jam tidak sibuk baik saat hari kerja dan hari libur.

Dinas Perhubungan Kota Padang menargetkan jumlah penumpang sebanyak lima juta di tahun 2024. Hal ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi transportasi umum di kota. Masyarakat Kota Padang dan sekitarnya diharapkan dapat terus merasakan kemudahan mobilitas yang diberikan Trans Padang, sehingga mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum. Dalam data dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM) total rata-rata penumpang seluruh koridor dari bulan Januari – Oktober 2024 per hari berjumlah 114,269 penumpang. Dalam perhitungan bulan pada data harian tersebut, penumpang berjumlah 3.328.070 dari bulan Januari – Oktober 2024. Meskipun angka ini menunjukkan potensi, jelas bahwa jumlah ini masih jauh dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Angka rata-rata penumpang ini mencerminkan bahwa Trans Padang belum beroperasi secara optimal.

Efektivitas pelayanan Trans Padang secara langsung berdampak pada ketertarikan masyarakat untuk mengganti penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Transportasi publik yang efektif dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke berbagai fasilitas publik yang akan berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam pengembangan kehadiran transportasi publik supaya berjalan efektif. Kehadiran Trans Padang sudah terhitung beberapa tahun lalu, minimnya penelitian terkait efektivitas Trans Padang ini pada masing-masing koridornya menjadi urgensi dari penelitian ini. Penelitian ini akan mengisi kekosongan dan memberikan data empiris yang dapat dijadikan rujukan.

Efektif atau tidaknya pemerintah menghadirkan BRT Trans Padang dalam mengatasi permasalahan lalu lintas, sangat bergantung pada pelayanan yang ditawarkan. Efektivitas BRT Trans Padang dapat dilihat dari jumlah penumpang per bus tiap rata-ratanya. Kualitas layanan BRT Trans Padang sangat penting untuk pemilihan masyarakat untuk menggunakan layanan ini. Kualitas layanan ini akan memungkinkan semakin banyak orang menggunakan transportasi umum dan semakin sedikit orang yang menggunakan kendaraan pribadi. Dengan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian terkait dengan efektivitas pelayanan Trans Padang pada 6 koridor tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pelayanan BRT Trans Padang pada 6 koridor?
2. Apakah terdapat perbedaan signifikan efektivitas pelayanan Trans Padang pada enam koridor?
3. Bagaimana kebijakan untuk optimalisasi pelayanan BRT Trans Padang dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada 6 koridor?

1.3. Tujuan Umum Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melakukan analisis terhadap efektivitas pelayanan BRT Trans Padang pada 6 koridor tersebut.
2. Mengidentifikasi perbedaan signifikan efektivitas pelayanan Trans Padang pada enam koridor.
3. Mengidentifikasi kebijakan untuk optimalisasi pelayanan BRT Trans Padang dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada 6 koridor tersebut.